

DESENTRALISASI FISKAL DAN PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009-2013

Ikrom Laily Shiyamah, Sujarwoto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: ikrom.laily@gmail.com

Abstract: Fiscal Decentralization and Development of Agriculture Sector in East Java Province at 2009-2013. This research examines the link between fiscal decentralization and agriculture sector development in East Java Province 2009-2013. Data on fiscal decentralization comes from National Financial Information System, while data on agriculture sector development comes from East Java Central Bureau of statistics. This research shows that East Java agriculture sector increases during 2009-2013 as seen from an increasing agricultural sector district gross domestic product. However, the widening gap of agricultural development gap persists between districts. Bivariate correlation analysis shows that general allocation fund (DAU), specific allocation fund (DAK), and district agriculture budget increases district gross domestic product of agriculture sector. However, district own source revenue is not.

Keywords: fiscal decentralization, development of agriculture sector, East Java Province

Abstrak: Desentralisasi Fiskal dan Perkembangan Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013. Penelitian ini mengkaji hubungan desentralisasi fiskal dan perkembangan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2013. Data desentralisasi fiskal bersumber dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Indonesia dan data tentang perkembangan sektor pertanian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor pertanian membaik selama tahun 2009-2013. Hal itu terlihat dari naiknya kontribusi PDRB sektor pertanian pada periode tersebut. Akan tetapi, kesenjangan pembangunan sektor pertanian juga tampak semakin melebar. Berdasarkan analisis korelasi ditemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana sektor pertanian berhubungan dengan perkembangan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berhubungan dengan perkembangan sektor pertanian.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, perkembangan sektor pertanian, Provinsi Jawa Timur

Pendahuluan

Desentralisasi di Indonesia telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk dapat lebih banyak dan secara langsung berkontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah. Pemerintah daerah yang pada hakikatnya lebih mengetahui kebutuhan dan potensi daerahnya akan mengarahkan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Sedangkan dengan adanya desentralisasi fiskal sebagai salah satu jenis desentralisasi, pembangunan ekonomi diharapkan akan lebih meningkat dengan dilimpahkannya urusan keuangan untuk mendukung tugas atau fungsi pemerintah yang dilimpahkan.

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian di Indonesia

cukup besar, dilihat dari kontribusi sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja nasional. Berdasarkan data Sensus Pertanian (ST) (2013), sektor pertanian menyumbangkan PDB sebesar 14,43 % dan menurut BPS (2013) penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 34,6% dari total tenaga kerja di Indonesia (Republika).

Melihat pentingnya kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan perekonomian menjadikan pengembangan sektor pertanian sangat perlu untuk dilakukan. Akan tetapi, meskipun memberikan kontribusi besar, namun pengembangan sektor pertanian pada masa desentralisasi masih belum dikatakan maju. Hal itu dikarenakan, pengembangan sektor pertanian masih dihadapkan pada beberapa masalah. Menurut Ketua Bidang Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nugrayasa (2012), salah satu masalah

pengembangan sektor pertanian adalah terbatasnya akses layanan usaha terutama permodalan. Padahal desentralisasi fiskal sebagai salah satu komponen utama dalam desentralisasi telah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk dapat meningkatkan pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu pendorong peningkatan ekonomi daerah.

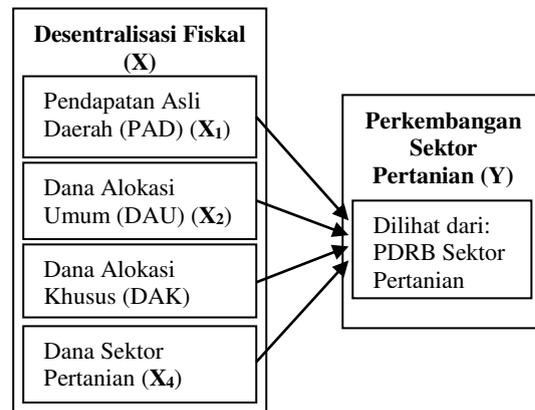
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara provinsi lainnya di pulau Jawa, pada tahun 2013 mencatat PDRB perkapita mencapai Rp 29,62 juta (PDRB Rp 1.136.326,87 Miliar serta jumlah penduduk proyeksi BPS 2013 sebesar 38,363 juta jiwa). Sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar di Provinsi Jawa Timur adalah dari sektor pertanian. Menurut BPS (2013) sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 37,4%. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu diadakan pengembangan sektor pertanian di Jawa Timur. Untuk mengembangkan sektor pertanian, salah satu hal yang dimungkinkan dapat dilakukan pemerintah adalah melalui desentralisasi fiskal atau melimpahkan urusan keuangan kepada daerah. Untuk itu penulis merumuskan masalah apakah desentralisasi fiskal berhubungan dengan perkembangan sektor pertanian di Jawa Timur.

Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis hubungan desentralisasi fiskal dan perkembangan sektor pertanian. Manfaat penelitian sebagai sumbangan pemikiran dan bahan kajian tentang kebijakan desentralisasi fiskal dan pengembangan sektor pertanian khususnya di Jawa Timur dan memberikan rekomendasi kebijakan tentang pengembangan sektor pertanian di Jawa Timur pada masa desentralisasi.

Desentralisasi Fiskal dan Perkembangan Sektor Pertanian

Gambar 1 menjelaskan hubungan antara beberapa variabel desentralisasi fiskal dengan perkembangan sektor pertanian dilihat dari anggaran. Anggaran terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana sektor pertanian. Untuk menilai mendukung atau tidaknya anggaran terhadap sektor pertanian dilihat dari: besar atau kecilnya alokasi dana. Apabila alokasi dana untuk sektor pertanian besar, maka dapat dikatakan bahwa anggaran mendukung terhadap sektor pertanian. Begitu juga sebaliknya, apabila alokasi dana untuk sektor pertanian kecil, maka dapat dikatakan bahwa anggaran tidak mendukung terhadap sektor pertanian.

Gambar 1: desentralisasi fiskal dan perkembangan sektor pertanian



Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif eksplanatori. Variabel independen terdiri dari komponen desentralisasi fiskal, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), Dana Alokasi Umum (DAU) (X_2), Dana Alokasi Khusus (DAK) (X_3), dan dana sektor pertanian (X_4). Sedangkan variabel dependen yaitu perkembangan sektor pertanian yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian (Y_1).

Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Timur. Sumber data diperoleh dari data sekunder. Populasi penelitian di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Sumber data tentang keuangan daerah diperoleh dari *database* sistem informasi keuangan daerah melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Indonesia. Sedangkan sumber data tentang perkembangan sektor pertanian diperoleh dari *database* Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan korelasi *Product Moment*. Statistik deskriptif untuk menjelaskan perkembangan sektor pertanian tahun 2009-2013. Korelasi *Product Moment* untuk melihat dan menganalisis hubungan desentralisasi fiskal dan perkembangan sektor pertanian.

Pembahasan

1. Perkembangan Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur

Perkembangan sektor pertanian ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. Apabila PDRB sektor pertanian meningkat, hal itu menunjukkan bahwa sektor pertanian semakin berkembang. Semakin berkembangnya sektor pertanian dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Tabel 1 berikut merupakan hasil rata-

rata 5 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan PDRB sektor pertanian tertinggi selama tahun 2009-2013. Sedangkan tabel 2 berikut merupakan hasil rata-rata 5 dari 38

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan PDRB sektor pertanian terendah selama tahun 2009-2013.

Tabel 1: Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Tertinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Provinsi Jawa Timur (Triliun rupiah)

Tahun	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Kehutanan	Perikanan
2009	3.993	1.643	1.371	251	1.415
2010	4.368	1.756	1.515	160	1.585
2011	4.755	1.904	1.658	295	1.757
2012	5.298	2.106	1.835	322	1.951
2013	5.852	2.334	2.087	364	2.210

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2013, diolah oleh penulis

5 kabupaten/kota dengan PDRB sektor pertanian tertinggi dari tahun 2009-2013 adalah Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, Kab. Malang, Kab. Sumenep, dan Kab. Blitar. Tabel 2 berikut

merupakan hasil rata-rata 5 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan PDRB sektor pertanian terendah selama tahun 2009-2013.

Tabel 2: Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Terendah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Provinsi Jawa Timur (Triliun rupiah)

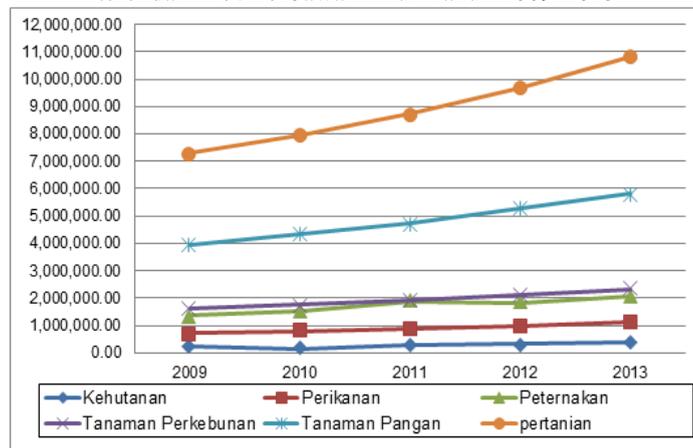
Tahun	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Kehutanan	Perikanan
2009	28	2	14	2	1
2010	22	2	15	2	1
2011	31	3	16	2	1
2012	33	3	18	2	2
2013	35	3	19	3	2

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2013, diolah oleh penulis

5 kabupaten/kota dengan PDRB sektor pertanian terendah dari tahun 2009-2013 didominasi oleh daerah perkotaan. Seperti Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Madiun dan lain-lain. Namun dengan berkembangnya sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur, ternyata

ditemukan bahwa selisih antara PDRB sektor pertanian tertinggi dan PDRB sektor pertanian terendah atas dasar harga berlaku selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun peningkatan tersebut dapat dilihat di gambar 2.

Gambar 2: Selisih antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Tertinggi dan terendah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

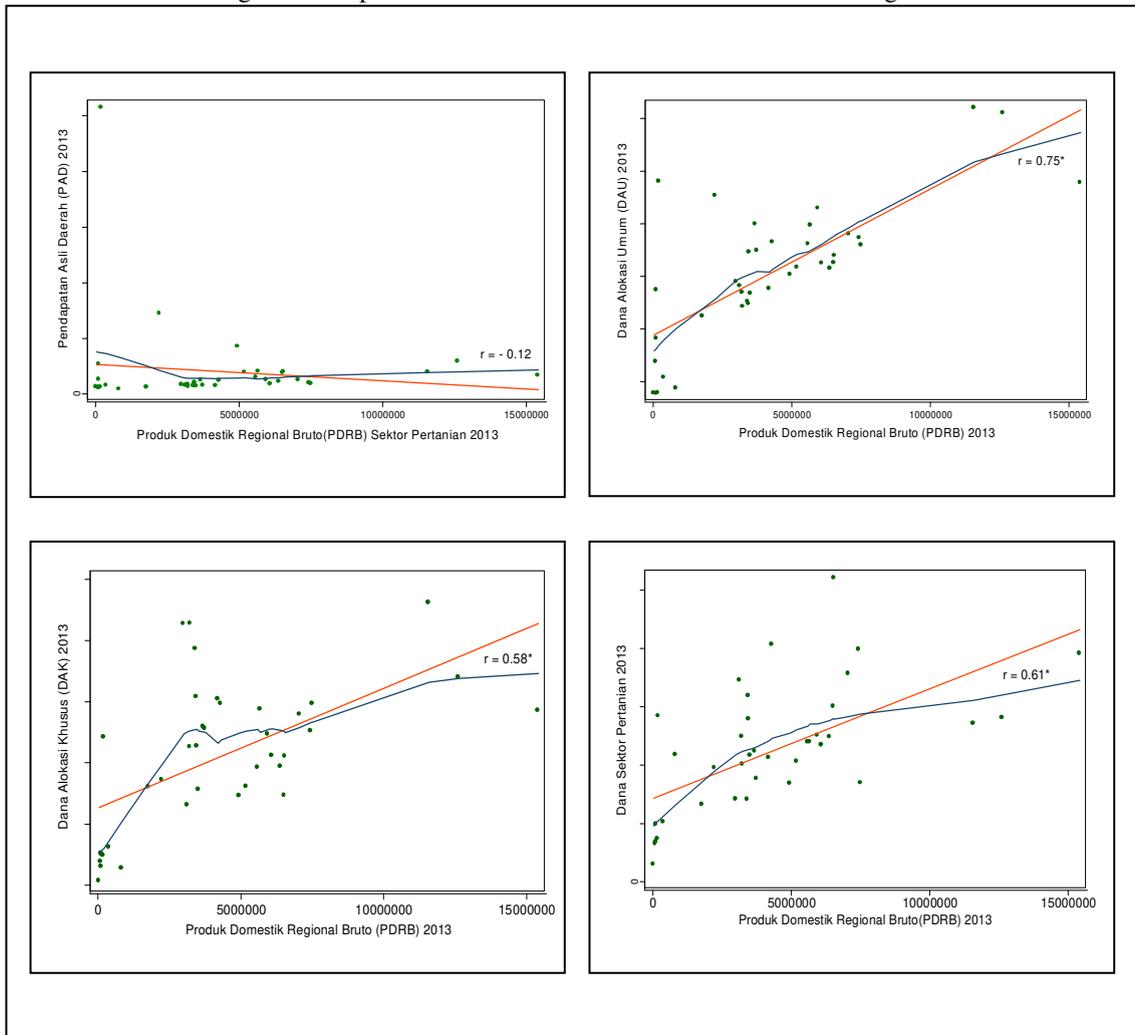


Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2013, diolah oleh penulis

2. Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Perkembangan Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara beberapa variabel desentralisasi fiskal dan perkembangan sektor pertanian.

Gambar 3: Hubungan Beberapa Variabel Desentralisasi Fiskal dan Perkembangan Sektor Pertanian



PAD dan PDRB sektor pertanian memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan dengan $r = -0.12$. Artinya, PAD dan PDRB sektor pertanian tidak memiliki hubungan. Hal itu dikarenakan, kabupaten/kota dengan PAD yang tinggi adalah kabupaten/kota yang tidak mengandalkan perekonomian daerahnya dari sektor pertanian. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini sebagian daerah perkotaan seperti Kota Surabaya memiliki PDRB sektor pertanian yang relatif kecil dibandingkan daerah-daerah lainnya. Daerah-daerah tersebut telah berubah menjadi pusat-pusat industri dan jasa yang relatif maju di Provinsi Jawa Timur.

DAU dan PDRB sektor pertanian memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan $r = 0.75$. Artinya, DAU dan PDRB sektor pertanian memiliki hubungan yang kuat. Kondisi

ini dapat dijelaskan bahwa dikarenakan semakin besar jumlah DAU yang didapatkan, maka semakin besar pula kemampuan suatu daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Sehingga daerah dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian.

DAK dan PDRB sektor pertanian memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan $r = 0.58$. Artinya, DAK dan PDRB sektor pertanian memiliki hubungan yang sedang. Penjelasan, karena alokasi DAK lebih diarahkan pada investasi pembangunan berupa sarana dan prasarana fisik penunjang yang berguna bagi masyarakat.

Dana sektor pertanian dan PDRB sektor pertanian berhubungan positif dan signifikan dengan $r = 0.61$. Artinya, dana sektor pertanian dan PDRB sektor pertanian memiliki hubungan

yang kuat. Penjelasananya, karena semakin tinggi dana sektor pertanian yang diterima daerah, maka semakin tinggi pula nilai PDRB sektor pertanian. Begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah dana sektor pertanian yang diterima, maka semakin rendah pula nilai PDRB sektor pertanian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perkembangan sektor pertanian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan dari tahun 2009-2013. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan PDRB seluruh sektor pertanian: tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. PDRB sektor kehutanan mengalami pasang surut pada periode tersebut.
2. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dalam bentuk alokasi DAU, DAK dan dana sektor pertanian berhubungan positif terhadap PDRB sektor pertanian. Sedangkan besarnya Pendapatan Asli Daerah atau PAD tidak berhubungan dengan besarnya PDRB sektor pertanian di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan PDRB sektor pertanian di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, khususnya di kabupaten/kota yang memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian tetapi perkembangannya masih lamban. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa memusatkan perhatian pada kabupaten/kota Kabupaten Magetan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa sektor pertanian di kabupaten/kota tersebut tidak mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam lima tahun terakhir.
2. Perlunya meningkatkan pembangunan sektor pertanian dengan memperbesar anggaran daerah baik DAU, DAK dan dana pertanian. Penelitian ini menunjukkan bahwa dana-dana desentralisasi fiskal tersebut bermanfaat bagi pengembangan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2009-2013.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2013) **Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Se Jawa Timur 2007-2011**. Jawa Timur.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2011) **Deskripsi dan Analisis APBD TA 2011**. Jakarta.
- Nugrayasa. (2012) **5 Masalah yang Membelit Pembangunan Pertanian di Indonesia**. [Internet] Diakses melalui <<http://www.old.setkab.go.id>> [diakses tanggal 1 Maret 2015].
- Zuraya, Nidia. (2013) **Kontribusi Pertanian dalam PDB Turun**. [Internet] Diakses melalui <<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/08/13/na7jft-kontribusi-pertanian-dalam-pdb-turun>> [diakses pada tanggal 20 Agustus 2015].